

PENUMBUHAN MODAL SOSIAL DAN BUDAYA (SOCIAL AND CULTURAL CAPITAL) MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Mirwan Fikri Muhkam¹ & Andi Aco Agus²

Institut Agama Islam Negeri Bone¹ & Universitas Negeri Makassar

E-mail: mirwan.fikrimuhkam@iain-bone.ac.id¹ & Andi.aco.agus@unm.ac.id

Abstrak

Pentingnya upaya membangun *social and cultural capital* demi menghadirkan kehidupan bersama melalui pemahaman nilai-nilai sosial kebudayaan. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki misi psikologis-pedagogis yakni membentuk warga negara yang sosialis yang bertanggungjawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur baik spiritual maupun materil yang berjiwa Pancasila. Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian bahwa Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (1) dapat membentuk keteladanan dan mengembangkan kreatifitas sebagai cerminan jati diri bangsa dengan nilai sosial kultural ke-Indonesiaan dalam menghadapi realitas sosial yang kurang menguntungkan secara kultural, (2) sebagai pembelajaran dapat menstimulus kemerdekaan pemikiran tentang isu sosial menumbuhkan keterlibatan warga negara dalam penyelesaian konflik sosial secara konstruktif, (3) dapat menumbuhkan wawasan serta aktivitas sosio kultural seperti tumbuhnya *social sensitive* dan memberikan kontribusi aksi sosial sesuai harapan di dalam masyarakat

Kata Kunci: Budaya, Pendidikan Kewarganegaraan,

Abstract

The importance of efforts to build social and cultural capital to bring a common life through understanding socio-cultural values. Citizenship Education has a psychological-pedagogical mission, namely forming socialist citizens who are responsible for the implementation of a just and prosperous Indonesian socialist society both spiritually and materially with the spirit of Pancasila. In this article, the method used is the literature study method. As for the results of the research that Civic Education Learning (1) can form transparency and develop creativity as a reflection of the identity of the nation with Indonesian socio-cultural values in the face of social realities that are not culturally beneficial, (2) as learning can stimulate freedom of thought on social issues fostering citizen involvement in the resolution of social conflicts constructively, (3) can foster socio-cultural insights and activities such as the growth of social sensitivity and provide contribution of social action as expected in society

Keywords: Culture, Civic Education,



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Salah satu gagasan dari lahirnya Ideologi Pancasila, yakni "*my nationality is my humanity*". Sebuah frasa yang menggambarkan suasana kebathinan Bung Karno saat merumuskan konsep ideologi Indonesia. Tersirat bahwa bangsa Indonesia mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Rasa kemanusiaan seharusnya tercermin dalam ide dan aksi sosial sebab tindakan

merupakan manifestasi dari buah pemikiran. Kepekaan sosial seyogyanya harus terus diasah di negeri yang menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup (*view of life*) yang dimana pluralisme, religiusitas, serta gotong royong adalah karakteristik yang seharusnya telah mendarah daging dalam jiwa raga masyarakat Indonesia. Jika nilai-nilai tersebut telah dipahami secara maknawi oleh individu, maka keadaban sosial akan selalu terhias dalam kehidupan

sehari-hari. Teringat kata Ki Hadjar Dewantara bahwa ciri khas dan watak bangsa Indonesia telah diabadikan di sila kedua yakni bangsa yang beradab, bangsa yang menginsyafi keluhuran nilai-nilai kemanusiaan serta mampu menyesuaikan hidupkebangsaannya.

Dalam masyarakat Indonesia, menurut Azyumardi Azra dalam (Azra, 2012) telah terjadi krisis sosial budaya yang diikuti kekerasan sosial yang muncul dengan banyak variannya seperti banyaknya anarkisme, premanisme, merosotnya penghargaan terhadap HAM yang mengatasnamakan etnis maupun agama. Hal tersebut dapat terjadi karena efouria demokrasi yang berlebihan hingga mengkerdikan suara minoritas sepanjang rezim dari pemenang dari pesta demokrasi tersebut. Menurut Y udistira dalam (Anggraini et al., 2020) Wawasan kebangsaan yang sempit ditambah pertarungan politik yang sengit justru menambah kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi bangsa. Kaum terdidik sangat dibutuhkan untuk memupuk rasa persatuan dan kebangsaan demi mengikis krisis sosial yang kian hari semakin muncul dipemberitaan. Jiwa sosial antar satu sama lain dalam hubungan dekat maupun jauh kian menipis, adanya teknologi baru yang penuh dengan kemodernan sehingga keberlangsungan bermasyarakat terkadang hanya di dunia maya saja. Dengan kondisi ini, maka seharusnya Pancasila menjadi dasar moral atau norma dan tolak ukur tentang baik dan buruk, benar dan salah sikap, perbuatan dan tingkah laku bangsa Indonesia.

Karakter *solidarity maker* sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar dapat mencegah disintegrasi kebangsaan. Dibutuhkannya diseminasi serta sosialisasi ideologi yang merupakan *common denominator* dengan pendekatan indoktrinatif maupun rezimentatif dalam upaya menghadirkan

gerakan sosio-kultural. Kompetensi sosial kultural menawarkan wawasan kebangsaan dimana diukur dengan hadirnya persemaian antara masyarakat yang majemuk (agama, suku, dan budaya) dengan keadaban demokrasi. Pentingnya upaya membangun *social and cultural capital* demi menghadirkan kehidupan bersama melalui pemahaman nilai-nilai sosial kebudayaan. Oleh sebab itu, sangat penting hadirnya pendidikan formal dalam hal ini pendidikan kewarganegaraan (*civic education*). Telah banyak pakar pendidikan memberikan statement meyakinkan bahwa pendidikan formal khususnya melalui Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting menumbuhkan pendewasaan demokrasi dan menghidupkan kepekaan sosial.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai instrument dalam memberikan pencerahan dalam mewujudkan warga negara yang memiliki kepekaan sosial dan aksi sosial dalam mewujudkan keadaban (*civic virtue*). Melalui Pendidikan kewarganegaraaan (*civic education*) dapat memberikan pemahaman tentang demokrasi yang berkeadaban, hak asasi manusia (HAM), kehidupan plural serta hadirnya toleransi dalam masyarakat majemuk. Melihat muatan Pendidikan Kewarganegaraan yang mengarah kepada tumbuhnya kewajiban moral untuk terlibat aktif dalam menghadirkan ide dan gagasan yang memecahkan permasalahan sosial bahkan lebih daripada itu menuntut hadirnya keterlibatan dalam menyelesaikan perilaku sosial yang menyimpang. Oleh sebab itu, menurut Muhtaj dalam (Muhtaj et al., 2020) kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan wajib menonjolkan dalam nuansa perubahan sosial yang masif dimana menuntut responsivitas khususnya kalangan pemuda Indonesia sebagai insan cendekia muda Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Dalam artikel ini, Metode Penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif dengan kajian penelitian kepustakaan (*library research*). Kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada (Sari, 2021). Penulis menggunakan penelitian deskriptif yang dimana lebih menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber seperti buku, catatan, jurnal dan data-data yang ada lalu mengkombinasikan dengan teori-teori dan konsep-konsep yang ada untuk diinterpretasikan berdasarkan tulisan yang mengarah pada pembahasan yang erat kaitannya dengan konsep pendidikan kewarganegaraan sosio kultural serta sosial humaniora.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki salah satu misi psikologis-pedagogis yakni membentuk warga negara yang sosialis yang bertanggungjawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur baik spiritual maupun materil yang berjiwa Pancasila. Dari misi psikologis-pedagogis tersebut tercermin bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan kepada warga negara dalam hal beradaptasi dengan masyarakat sebagai penjelmaan dari nilai sosialis. Masyarakat sosialis erat kaitannya dengan kondisi kehidupan yang penuh dengan kebersamaan dan nilai-nilai kegotong royongan, artinya pembelajaran kewarganegaraan bermula kepada konsep kebangsaan yang mengidamkan kondisi harmoni dalam keberagaman itu sendiri.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks masyarakat (*community*

civic education) sebagai wahana pendidikan formal maupun informal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan sehingga menawarkan partisipasi aktif dalam masyarakat (*civic engagement*). Dalam pandangan Thomas Ehrlich (2017) bahwa *civic engagement* merupakan bentuk kepedulian perseorangan atau publik yang yang memperkaya sumbangsih atau kontribusi baik kemaslahatan individu maupun masyarakat yang majemuk. Dalam sebuah jurnal internasional (Kim et al., 2016) dijelaskan bahwa ada 5 (lima) karakteristik positif dalam keterlibatan warga negara (*civic engagement*), yakni kepercayaan, kompetensi, koneksi, karakter dan kepedulian. Oleh sebab itu, keterlibatan warga negara memiliki potensi besar dalam menumbuhkan kompetensi, keadaban warga negara, serta tanggung jawab moral sebagai warga negara serta adanya kepekaan sosial pada diri manusia untuk menyelesaikan secara bersama hal-hal yang tidak sesuai dengan teori maupun rasa kemanusiaan.

Dalam sebuah jurnal dijelaskan (Aulia & Arpanudin, 2019) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sebuah program sosial-kultural memang telah dan sedang berjalan dan terjadi di tengah-tengah Masyarakat. Juga Pendidikan kewarganegaraan diperkuat dalam (Rukanda & Nurhayati, 2020) sebagai proses pendidikan untuk membentuk keteladanan kemauan serta kemampuan dalam mengembangkan kreatifitas sebagai cerminan jati diri bangsa dengan nilai-nilai sosial kultural ke-Indonesiaan. Dalam pelaksanaannya terdapat dua jenis penerapannya, yakni yang disengaja maupun tidak disengaja. *Pertama*, disengaja sebagai program pendidikan sehingga menimbulkan dampak pembelajaran (*instructional effects*). *Kedua*, tidak disengaja yang dalam

penerapannya dapat dikategorikan sebagai dampak pengiring (*nurturant effects*) dari sebuah aktifitas atau kegiatan. Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri bahwa masing-masing lingkungan memiliki kultur yang berbeda, ada yang dikategorikan baik atau kurang baik menurut subyektifitas manusia sehingga kondisi yang kurang baik inilah yang harus ditopang oleh pendidikan formal (program yang disengaja) agar dapat dibekali pembelajaran sehingga memiliki kompetensi sosial dalam menghadapi realitas sosial yang kurang menguntungkan secara kultural.

Lebih daripada itu, Bunyamin Maftuh (Pancasila, 2008) meyakini bahwa Pendidikan Kewarganegaraan pada masa sekarang ini adalah sebagai pendidikan resolusi konflik sehingga dapat membina siswa maupun mahasiswa agar mampu menyelesaikan konflik-konflik sosial secara konstruktif. Oleh sebab itu, dapat dikatakan pendidikan kewarganegaraan formal menawarkan kompetensi aksi sosial atau perilaku sosial. Aksi sosial dalam (Rukanda & Nurhayati, 2020) dijelaskan sebagai kegiatan yang terkoordinasikan dengan tujuan suatu perubahan kelembagaan dalam hal memenuhi kebutuhan, memecahkan permasalahan, kemampuan dalam mengoreksi ketimpangan atau meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh sebab itu, peran PKn sebagai pendidikan resolusi konflik sangat dibutuhkan untuk memberi stimulus dalam hal keterlibatan dalam masyarakat atau dikenal dengan *civic engagement* karena kemampuan penyelesaian masalah tidak akan dapat dimanfaatkan jika kepekaan sosial tidak tumbuh atau tidak terlibatnya individu dalam masyarakat.

Secara epistemologis, pendidikan kewarganegaraan dikembangkan dalam tradisi *civic education* dan *citizenship education* yang tujuan pembelajarannya sesuai dengan tujuan nasional masing-

masing negara. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan keIndonesiaan, sebagaimana pandangan Wahab & Sapriya (2011) bahwa secara umum tujuan negara mengembangkan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar setiap individu atau masyarakat Indonesia menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (*civic intellegence*), baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual serta memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*civic responsibility*) serta mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*civic participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Melihat tujuan nasional pendidikan Indonesia dalam konteks pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, sangatlah memadai untuk membekali warga negara kompetensi yang dapat menciptakan keharmonisan antarsesama masyarakat serta menjadi perekat persatuan dan kesatuan dari segala perbedaan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Pendidikan kewarganegaraan tidaklah berkonsentrasi pada lingkup yang terbatas di jenjang pendidikan formal, namun bersinggungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan partisipasi aktif dalam masyarakat sebagaimana statusnya sebagai warga negara yang secara tidak langsung menjadi komunitas politik serta kontribusi lingkungan informal dalam menunjang tujuan dari pendidikan kewarganegaraan untuk mencetak warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*). Didalam konteks pendidikan kewarganegaraan itu pula dijelaskan dalam (Zayyini Rusyda, 2021), kita dapat kaji kontribusi atau peran dari keluarga, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, media juga bagian lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat dikategorikan kepada wahana

dimana peran dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri.

Pendidikan Kewarganegaraan harusnya menjelmah menjadi pendidikan karakter berwawasan sosiokultural. Dalam sebuah jurnal (Tiara & Yarni, 2019) dijelaskan bahwa wawasan sosiokultural bertujuan untuk mengatur tingkah laku seseorang dalam kelompok, membuat seseorang sensitif terhadap status sebagai warga negara, dan mengetahui apa yang diharapkan orang lain terhadap dirinya dan apa yang akan terjadi jika tidak memenuhi harapan-harapan mereka. Oleh sebab itu, peran Pendidikan Kewarganegaraan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kepribadian yang memiliki kompetensi, kepercayaan diri dan berkomitmen untuk memerdekakan pemikiran tentang isu-isu sosial serta turut untuk turun tangan dalam rangka mewujudkan aksi atau perilaku sosial.

Menurut Rusli Ibrahim (2001), perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia sebagai bukti bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai diri pribadi tidak dapat melakukannya sendiri melainkan memerlukan bantuan dari orang lain. Artinya bahwa kelangsungan hidup manusia berlangsung dalam suasana saling mendukung dalam kebersamaan yang dimana melahirkan saling memahami antar sesama (*mutual understanding*). Untuk itu manusia dituntut mampu bekerja sama, saling menghormati, tidak mengganggu hak orang lain, toleran dalam hidup bermasyarakat. Adapun pola perilaku sosial yang dijelaskan oleh Elizabeth Hurlock dalam (Kusuma & Sutapa, 2020) yakni adanya sikap kerjasama, persaingan dalam hal kebaikan, kemurahan hati, hasrat akan penerimaan sosial, simpati, empati, ketergantungan, sikap ramah, sikap tidak mementingkan diri sendiri, meniru,

perilaku kelekatan atau mengembangkan hubungan yang penuh cinta dan kasih.

Secara konseptual-epistemologik, Menurut Udin S. Winataputra (2015) dalam konteks pengembangan tubuh atau substansi keilmuan (*body of knowledge*), Pendidikan Kewarganegaraan menjadi wahana pendidikan demokrasi yang terkandung unsur atau dimensi penumbuhan interaktif dalam keterlibatan masyarakat, yakni salah satunya sebagai proses pembudayaan atau enkulturasi dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. sebagai Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan telah bertransformasi mengarah ke pemahaman demokrasi berlandaskan nilai kebudayaan yang dimana menumbuhkan kemampuan interaktif dalam hal menyelesaikan konflik sosial yang mengedepankan nilai-nilai kebudayaan sehingga mampu meminimalisir krisis sosial yang banyak timbul akibat gejolak politik dari proses demokrasi yang sangat panjang sehingga kembali kepada nilai-nilai kebangsaan. Oleh sebab itu, dalam konteks pengembangan ilmu kewarganegaraan sangat pantas disebut sebagai proses pengembangan aktivitas sosio-kultural kewarganegaraan (Winataputra, 2011).

Larson dan Smalley (1972) menggambarkan sosiokultural sebagai sebuah *blue print* yang menuntun perilaku manusia dalam sebuah masyarakat dan ditetaskan dalam kehidupan keluarga. Berpijak dari hal tersebut, pendidikan karakter berwawasan sosio-kultural menuntun para peserta didik maupun mahasiswa (output pendidikan formal) sebagai manusia yang mampu memahami dan menghargai dirinya dan perbedaan yang terdapat didalam lingkungannya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mampu melahirkan generasi yang mencintai nilai kerukunan

yang mengedepankan nilai toleransi akan masyarakat yang plural, penghormatan atas harkat dan martabat manusia yang dalam bahasa modern disebut sebagai penghargaan atas Hak Asasi Manusia. Memahami perbedaan juga adalah karakter mendasar dari Pancasila yang memiliki unsur utama yakni nilai pluralitas. Dalam sebuah artikel (Muhkam & Badaruddin, 2021) dijelaskan bahwa karakter pluralisme itu bukanlah tentang keberagaman dan perbedaan semata melainkan keterlibatan kita pada keberagaman itu sendiri. Dari kesadaran terhadap pluralitas inilah akan menumbuhkan sikap saling memahami (*mutual understanding*) keyakinan masing-masing dan pada gilirannya moralitas akan terwujud.

Menurut Larson dan Smalley dalam (Tiara & Yarni, 2019) juga mengemukakan tentang bagaimana sosio-kultural menjadi pedoman perilaku manusia dalam sebuah masyarakat. Dalam hal ini, wawasan sosiokultural yang akan diintegrasikan pada Pendidikan karakter bertujuan untuk mengatur tingkah laku seseorang dalam kelompok, membuat seseorang sensitif terhadap status, dan membantunya mengetahui apa yang diharapkan orang lain terhadap dirinya dan apa yang akan terjadi jika tidak memenuhi harapan-harapan mereka. Dari penjelasan di atas dimana konsep dari sosiokultural mengarah kepada tumbuhnya kepekaan sosial atas segala isu-isu sosial dilingkungan masyarakat. Kemerdekaan pemikiran warga negara tentang isu serta aksi sosial merupakan cikal bakal dalam tumbuh kembangnya keadaban warga negara sehingga Pendidikan Kewarganegaraan sangat memiliki peran mewujudkan solusi dalam permasalahan-permasalahan sosial yang timbul akibat pesta demokrasi, perbedaan argumentasi serta miskinnya rasa toleransi sehingga pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan sebagai pendidikan resolusi konflik untuk menyelesaikan masalah sosial secara konstruktif. Oleh sebab itu, Pendidikan Kewarganegaraan adalah instrument pembelajaran untuk menstimulus pemikiran tentang problematika sosial dan juga menjadi pemicu (*trigger*) untuk melakukan aksi sosial dari masalah masalah agar tidak ada ketimpangan sehingga rasa saling ketergantungan yang dilandasi kasih sayang dapat terus dipupuk sehingga tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan yakni diantaranya menumbuhkan kepekaan sosial dan penumbuhan partisipasi warga negara dalam bermasyarakat dan bernegara selalu terwujud.

KESIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk keteladanan dan mengembangkan kreatifitas sebagai cerminan jati diri bangsa dengan nilai sosial kultural ke-Indonesiaan dalam menghadapi realitas sosial yang kurang menguntungkan secara kultural Melalui Pendidikan Kewarganegaraan diyakini mewujudkan karakter warga negara yakni keadaban (*civic virtue*) yang mampu menawarkan kepekaan sosial dan aksi sosial serta memberikan pemahaman tentang demokrasi yang berkeadaban, Hak Asasi Manusia, kehidupan plural serta hadirnya toleransi dalam masyarakat majemuk. Saat ini Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan resolusi konflik sehingga dapat membina siswa maupun mahasiswa agar mampu menyelesaikan konflik-konflik sosial secara konstruktif.

Pendidikan Kewarganegaraan telah menjelmah menjadi pendidikan karakter berwawasan nilai-nilai sosio kultural sehingga dapat menumbuhkan wawasan serta aktivitas sosio kultural seperti tumbuhnya *social sensitive* dan

memberikan kontribusi aksi sosial sesuai harapan di dalam masyarakat. Dalam wawasan sosiokultural bertujuan untuk mengatur tingkah laku seseorang dalam kelompok, membuat seseorang sensitif terhadap status sebagai warga negara, dan mengetahui apa yang diharapkan orang lain terhadap dirinya dan apa yang akan terjadi jika tidak memenuhi harapan-harapan mereka serta merupakan suatu wahana pendidikan demokrasi yang mengandung empat dimensi konseptual interaktif, yakni kajian ilmiah kewarganegaraan dalam ilmu pendidikan, program kurikuler kewarganegaraan di lembaga pendidikan formal dan nonformal, sebagai pembudayaan atau enkulturasi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara (aktivitas sosio-kultural kewarganegaraan).

Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan wajib menonjolkan dalam nuansa perubahan sosial yang masif dimana menuntut responsivitas kepada peserta didik atau mahasiswa agar semangat *social of control* selalu terjaga. Melibatkan institusi pendidikan pada masyarakat dalam hal diskusi maupun dialog serta khususnya akademisi yang konsen di bidang pendidikan kewarganegaraan agar pendewasaan masyarakat dalam demokrasi pancasila

tetap terjaga.

Bijak dalam rangka penggunaan teknologi atau dengan kata lain mengedepankan sosial budaya dalam penggunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi demi mencegah ketersinggungan SARA yang dapat mengakibatkan konflik sosial. Memperbanyak *workshop* yang dilakukan oleh Pendidikan Tinggi khususnya dalam pengembangan kompetensi guru dibidang kewarganegaraan agar pendidikan formal yang diajarkan dalam lingkup pendidikan selalu terhubung dengan realitas social demi tumbuh kembangnya sense of social sensitive (kepekaan social) serta menumbuhkan keahlian warga negara (*civic skill*) yang menjadi salah satu tujuan pendidikan kewarganegaraan yakni pendidikan resolusi konflik demi mencegah permasalahan social yang selalu tumbuh dalam masyarakat.

Menyampaikan saran *stakeholder* dalam hal proses demokrasi tahapan pemilihan umum dipersingkat karena sangat memungkinkan terjadinya polarisasi yang berkepanjangan dalam masyarakat sehingga sangat berpotensi besar melahirkan perdebatan panjang yang mengakibatkan kebencian sehingga melahirkan konflik-konflik sosial di segala sektor.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., Fathari, F., Anggara, J. W., & Ardi Al Amin, M. D. (2020). Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Milenial. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(1), 11. <https://doi.org/10.33474/jisop.v2i1.4945>
- Aulia, S. S., & Arpanudin, I. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Lingkup Sosio-Kultural Pendidikan Non-Formal. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.36412/ce.v3i1.902>
- Azra, A. (2012). Kegagalan Identitas dan Kekerasan Sosial: Multikulturalisme, Demokrasi dan Pancasila. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.15408/empati.v1i1.9656>
- Kim, Y. Il, Jang, S. J., & Johnson, B. R. (2016). Tying Knots With Communities: Youth Involvement in Scouting and Civic Engagement in Adulthood. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 45(6), 1113–1129. <https://doi.org/10.1177/0899764016634892>
- Kusuma, W. S., & Sutapa, P. (2020). Dampak Pembelajaran Daring terhadap Perilaku Sosial

- Emosional Anak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1635–1643. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.940>
- Muhkam, M. F., & Badaruddin, S. (2021). Religious Pluralism in the Framework of Pancasila Ideology. *Al-Bayyinah*, 5(2), 129–141. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.1718>
- Muhtaj, M. El, Fahmi, ; M, Reh, S. ;, Beru, B., & Fazli, P. ; (2020). *LITERASI HAK ASASIMANUSIA DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (Human Rights Literacy in the Curriculum of Citizenship Education in Indonesia Higher Education)*. 369–385. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.369-386>
- Pancasila, I. N. (2008). *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. II(2)*.
- Rukanda, N., & Nurhayati, S. (2020). *Jurnal Comm-Edu*. 5492, 144–155.
- Sari, R. K. (2021). Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia. *Jurnal Borneo Humaniora*, 4(2), 60–69. http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/borneo_humaniora/article/view/2249
- Tiara, M., & Yarni, N. (2019). Pendidikan Karakter Berwawasan Sosiokultural Di Sma Kota Padang. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(2), 297–302. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v2i2.487>
- Zayyini Rusyda, M. (2021). Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar. *Edukasia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2 Issue 2(Optimalisasi, pendidikan pesantren, kebijakan), 167–180. <http://www.jurnaledukasia.org/index.php/edukasia/article/view/461>
- Ibrahim, Rusli. 2001. *Promosi Kesehatan Dengan Pendekatan Teori Prilaku, Media, Dan Aplikasinya*. Semarang: PT. Raja Grafindo Persada.
- Somantri, M.N., & Winataputra, U. S. 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan: Kultur Akademis dan Pedagogis*. Bandung : Lab. PKn UPI
- Wahab, A. A., & Sapriya. 2011. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Winataputra, U. S. 2015. *Pendidikan kewarganegaraan: Refleksi historis- epistemologis dan rekonstruksi untuk masa depan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Winataputra, U. S. 2001. *Jati diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi*. Disertasi. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
- Yudistira. 2016. *Aktualisasi & Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menumbuhkan Kembangkan Karakter Bangsa*. Prosiding : Seminar Nasional Hukum .Vol. 2, Hal. 421–436.